

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung pada Masa Sebelum Pandemi dan Pasca Pandemi COVID-19

Astri Fadhilah<sup>\*</sup>, Ria Haryatiningsih

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>astriifadhilah@gmail.com, ria.haryatiningsih@gmail.com

**Abstract.** *The purpose of this study is to assess the financial performance of the Bandung City Government before the 2018–2019 pandemic and after the 2020–2021 pandemic. By assessing the level of financial ratios, the research methodology is descriptive quantitative. These ratios are independence, effectiveness, and efficiency. The data obtained comes from the Bandung City Government Budget Realization Report document for 2018-2021. The results show that the level of independence before the pandemic and post-pandemic has decreased from delegative to participatory, the effectiveness ratio of Regional Original Revenue in Bandung City is less effective, and the level of efficiency ratio is still above 90% which indicates that the financial performance is less efficient.*

**Keywords:** *Independence, Effectiveness, Efficiency.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung sebelum pandemi 2018–2019 dan pasca pandemi 2020–2021. Dengan menilai tingkat rasio keuangan, metodologi penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Rasio tersebut adalah kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Data yang diperoleh berasal dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung tahun 2018 – 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rasio kemandirian sebelum pandemi dan pasca pandemi mengalami penurunan dari delegatif menjadi partisipatif, tingkat rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung kurang efektif, dan tingkat rasio efisiensi masih di atas 90% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan kurang efisien.

**Kata Kunci:** Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi.

## A. Pendahuluan

Peningkatan pembangunan daerah mendorong pembangunan nasional. Pembangunan daerah terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara lebih terpadu, serasi, dan seimbang, menjamin terselenggaranya pembangunan di daerah-daerah berdasarkan prioritas dan potensi daerah, menjamin laju pertumbuhan antar daerah lebih serasi dan seimbang, dan bahwa pembangunan nasional dan hasilnya lebih merata di seluruh Indonesia (1). Pelaksanaan pembangunan daerah yang memerlukan penggunaan dana internal. Seiring dengan pendanaan untuk mengeksplorasi kemungkinan daerah saat ini, hal yang paling penting adalah mengembangkan kesadaran akan kemampuan perencanaan. Akibatnya, untuk melaksanakan setiap program yang direncanakan, setiap bidang yang dikembangkan membutuhkan anggaran yang sesuai. (2).

Pesatnya pembangunan telah membawa beberapa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu pergeseran tersebut adalah dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang disebut sebagai "Otonomi Daerah". Pada dasarnya Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan daerah berdasarkan gagasannya sendiri dan dukungan serta aspirasi masyarakat (3). Era otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan otonomi daerah, daerah memiliki kontrol yang lebih besar terhadap pengelolaan wilayahnya. Untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah pusat, daerah harus menjadi lebih mandiri. Ketika suatu daerah diklaim sebagai daerah yang otonom, efektif, efisien, dan bertanggung jawab, maka diperlukan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam merumuskan kebijakan keuangan untuk tahun anggaran berikutnya. Kemampuan daerah untuk menemukan dan mengelola sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi tuntutan untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya kepada pusat, disebut sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memiliki kelonggaran dalam membelanjakan uang mereka selama mereka mengikuti aturan. (4)

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mencapai tiga tujuan. Pertama dan terpenting, untuk membantu peningkatan kinerja pemerintah. Kedua, membuat penilaian dan mendistribusikan sumber daya. Ketiga, meningkatkan komunikasi kelembagaan untuk mencapai akuntabilitas publik. Kinerja adalah upaya yang dilakukan sesuai dengan rencana organisasi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kinerja organisasi dapat dikatakan memuaskan. Di sisi lain, jika itu bertentangan dengan rencana organisasi, dapat dikatakan bahwa itu berjalan dengan baik. Namun, jika perencanaan gagal memberikan hasil yang diinginkan, kinerja mungkin digambarkan sebagai buruk. Kinerja keuangan adalah metrik yang dihitung berdasarkan informasi keuangan.(5)

Analisis ini diharapkan untuk menjadi alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam upaya merealisasikan pendapatan daerah serta mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah. Dampak pandemi Covid 19 di Kota Bandung sangat terasa, ketika pembatasan sosial berskala besar diterapkan sangatlah mengganggu mobilitas masyarakat sehari-hari. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Lapangan usaha yang mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan. Sementara status pekerjaan yang mengalami dampak paling parah yaitu pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri (yang pada umumnya berskala mikro), berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap. Namun setelah pelaksanaan *new normal* diterapkan kegiatan perekonomian mulai berangsur-angsur membaik, dan kegiatan berlangsung seperti biasanya. Mengutip laman (6), Kota Bandung kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1 triliun akibat pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada sisi kehidupan masyarakat. Wabah covid ini terjadi sangat mempengaruhi semua sektor perekonomian. Pendapatan bisa turun drastis akibat sepi pembeli. Pada rasio kemandirian daerah menunjukkan bahwa pemerintah mampu sendiri membiayai kegiatan pelayanan masyarakat contohnya membayar

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah dan juga dapat diukur pada rasio efektivitas daerah, juga menggambarkan keberhasilan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan.

Menurut (7), percaya bahwa mengukur kinerja keuangan tidak hanya pada indikator keuangan tetapi juga pada indikator non-keuangan membantu untuk mengevaluasi bagaimana ukuran kinerja keuangan diukur dan memiliki pengaruh pada peningkatan kualitas. Diperkirakan bahwa dengan menggabungkan peningkatan infrastruktur saat ini oleh pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah akan didorong. Pertumbuhan ekonomi daerah akan mendorong peningkatan pendapatan penduduk di wilayah yang terkena dampak dengan menarik investor untuk menciptakan usaha, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Menurut (8), sistem keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang terpenting adalah memahami kapan dan dalam kondisi apa keuangan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi efisiensi, sehingga pemerintah dapat berperan. peran kunci dalam menentukan kapan sistem keuangan membaik atau memburuk. Akibatnya, pemerintah harus menentukan apakah uang transfer yang digunakan sebagai belanja daerah dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas, sehingga meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi yang tepat dan dengan demikian merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah. Komposisi APBD, serta pendapatan seperti alokasi pendapatan dan belanja, adalah semua faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi keberhasilan keuangan pemerintah daerah. Lanskap regional digambarkan dalam analisis ini. Dengan adanya fenomena tersebut yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan berbasis rasio mengenai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, karena ingin mengetahui bagaimana gambaran kinerja pemerintahan Kota Bandung jika semua terealisasi dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan, juga sejauh mana Pemerintahan Kota Bandung mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan sosial bagi masyarakat dengan baik di tahun-tahun berikutnya.

Dilihat dari penjelasan di atas terkait kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung yang dianalisis melalui Laporan Realisasi Anggaran dan juga peristiwa –peristiwa yang terjadi di lapangan yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung Pada Masa Sebelum Pandemi Pada Tahun 2018-2019 dan Pasca Pandemi Tahun 2020-2021 jika berdasarkan rasio keuangan yaitu dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan ciri-ciri populasi tertentu secara sistematis, faktual, dan benar, atau mencoba mengkaraktisasi fenomena secara mendalam (9). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder. Laporan Realisasi APBD dengan periode waktu 4 (empat) tahun dan dibagi dalam 2 (dua) periode yaitu sebelum pandemi Covid-19 tahun 2018-2019 dan masa pandemi Covid 19 yaitu tahun 2020-2021. Menghitung rasio keuangan dan mengevaluasi serta mendeskripsikan perhitungan rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi merupakan langkah-langkah penilaian laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018-2021. Perhitungan masing – masing rasio keuangan tersebut ditulis dengan rumus sebagai berikut :

### **Rasio Kemandirian**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai suatu proyek pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah berkontribusi terhadap kebutuhan keuangan daerah melalui pajak dan retribusi. Rasio pendapatan daerah dari sumber daya alam dan sumber bukan pajak lainnya, seperti dana alokasi umum dan khusus, dana darurat, dan kredit, terhadap pendapatan daerah dari sumber lain (penerimaan transfer), seperti bagi hasil pajak.

**Rasio Kemandirian**

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 1.** Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber : (10)

**Rasio Efektivitas**

Perbandingan kinerja dan anggaran PAD digunakan untuk menentukan rasio ini. Kemudian, tingkat rasio pendapatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996. Rumus untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2.** Nilai Efektivitas

Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektivitas
100%	Efektivitas
90% - 99%	Cukup Efektivitas
75% - 89%	Kurang Efektivitas
<75%	Tidak Efektivitas

Sumber: (11)

**Rasio Efisiensi**

Rasio antara keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan tersebut digambarkan dengan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD). Jika rasionya kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100 persen, pemungutan pajak dianggap efektif. Kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik semakin rendah rasio efisiensi keuangan daerah.

$$\text{Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3.** Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Kota Bandung dalam bidang keuangan pada masa sebelum pandemic covid-19 dan pasca pandemi covid-19. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung yang didapat dari PPID Kota Bandung. Dari data tersebut dapat diketahui Kinerja Keuangan Kota Bandung. Adapun hasil Analisis Rasio tersebut adalah:

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian mengidentifikasi sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai semua operasinya dan memberikan layanan kepada penduduk setempat. Rasio derajat kemandirian menjelaskan seberapa besar manfaat yang diperoleh masyarakat dari membayar pajak dan retribusi. Temuan perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Kota Bandung sebelum pandemi pada tahun 2018-2019 dan pasca pandemi 2021-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.** Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kondisi	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer	Hasil Rasio	Kriteria
Sebelum Pandemi	2018	2,571,591,768,199	3,324,851,637,219	77%	Tinggi
	2019	2,548,258,990,275	3,626,141,954,361	70%	Sedang
Setelah Pandemi	2020	2,063,783,773,735	3,352,264,380,653	62%	Sedang
	2021	2,195,971,884,100	3,417,764,482,463	64%	Sedang

Sumber : Data Sekunder Diolah

Pada tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi 2018–2019 dan pascapandemi 2020–2021, tingkat kemandirian finansial Pemerintah Kota Bandung menurun dari kemampuan tingkat tinggi ke tingkat kemampuan sedang, seperti terlihat pada Tabel 1. Tingkat kemampuan sedang ditunjukkan dengan rata-rata rasio yang dihasilkan, yaitu 72,85 persen. Pergeseran dari hubungan delegatif ke partisipatif antara pemerintah daerah dan pihak luar juga dipengaruhi oleh penurunan rasio ini.

Penurunan rasio derajat kemandirian ini menunjukkan ketergantungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah pada bantuan luar, bantuan tersebut dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Karena nilai rasio yang menurun, ketergantungan ini terlihat meningkat. Dari sisi pendanaan baik penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah, Pemkot Bandung dinilai kurang mampu. Pasalnya, kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan PAD masih jauh dari ideal. Rendahnya pengetahuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah merupakan persoalan lain yang dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan.

### Rasio Efektivitas Daerah

Jika tingkat rasio efektif yang dicapai lebih besar dari 100% maka kinerja Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan efektif. Angka rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan seberapa baik Pemerintah Kota Bandung menggunakan pendapatannya. Hasil efektivitas kinerja Pemerintah Kota Bandung sebelum pandemic pada tahun 2018-2019 dan sesudah pandemic pada tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.** Rasio Efektivitas

Kondisi	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Hasil Rasio	Kriteria
Sebelum Pandemi	2018	2,571,591,768,199	3,397,309,517,811	76%	Kurang Efektif
	2019	2,548,258,990,275	3,252,540,610,057	78%	Kurang Efektif
Setelah Pandemi	2020	2,063,783,773,735	2,264,814,094,039	91%	Efektif
	2021	2,195,971,884,100	2,409,804,328,188	91%	Efektif

Sumber : Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel 2, kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung sebelum pandemi 2018–2019 tidak memenuhi syarat efektif untuk perhitungan rasio efektifitas. Dari rasio yang dihasilkan, yang hanya mencapai 76% dan 78%, masih di bawah 90 persen. Sedangkan pada masa pandemi di tahun 2020-2021 barulah kinerja keuangan Kota Bandung mendapat kriteria efektif dengan rasio yang dihasilkan adalah sebesar 91%. Namun secara keseluruhan realisasi dan anggaran PAD tahun 2020 justru berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang memerlukan penyesuaian kebijakan dan realokasi sumber daya untuk memerangi pandemi. Karena pajak dan retribusi daerah belum menghasilkan pendapatan yang maksimal, efektivitas PAD belum tercapai. Berbagai kendala, antara lain adanya aturan pemungutan pajak, kesulitan dengan realitas penganggaran dan retribusi, dan kurangnya dukungan dari pengusaha daerah dalam memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah, berkontribusi pada pemungutan pendapatan yang tidak maksimal.

### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Apabila hasil nilai rasio efisiensi yang diperoleh pemerintah kurang dari 80% maka kinerja Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan efisien. Kapasitas masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ditingkatkan dengan rasio efisiensi yang lebih rendah. Hasil rasio efisiensi dari perhitungan di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.** Rasio Efisiensi

Kondisi	Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Hasil Rasio	Kriteria
Sebelum Pandemi	2018	6,114,449,093,123	5,939,997,423,418	103%	Tidak Efisien
	2019	6,312,147,268,359	6,381,818,944,636	99%	Kurang Efisien
Setelah Pandemi	2020	5,407,125,732,054	5,643,962,288,458	96%	Kurang Efisien
	2021	5,675,599,520,638	5,838,244,931,395	97%	Kurang Efisien

Sumber : Data Sekunder Diolah

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung pada masa sebelum pandemi 2018–2019 dan pascapandemi 2020–2021 belum memenuhi standar efisien, sesuai temuan perhitungan rasio pada tabel 3. Angka rasio efisiensi masih di atas 80%, yang merupakan tandanya. Kinerja keuangan terbukti kurang efisien dalam membelanjakan pengeluarannya dengan rata-rata 98,57 persen. Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kota Bandung masih kurang baik karena pengeluarannya masih lebih erat hubungannya dengan pendapatan yang direalisasikan. Besarnya pengeluaran operasional setiap tahun membuat kesimpulan perhitungan rasio rendah menjadi jelas. Meskipun pada tahun 2018 tingkat rasio sangat tinggi, Pemerintah Kota Bandung berupaya memangkas belanja di tahun-tahun berikutnya guna menurunkan persentase yang digunakan dalam perhitungan rasio efisiensi.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2018 – 2022 berdasarkan Rasio Kemandirian mengalami penurunan. Pada periode 2 tahun pertama tingkat kemampuan keuangan sempat tinggi dengan pola delegatif. Tetapi ditahun selanjutnya hingga periode berikutnya tingkat kemampuan menurun menjadi sedang dan pola hubungan pun berubah menjadi partisipatif. Penurunan tingkat rasio ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih memerlukan bantuan dari pihak eksternal yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu penurunan rasio menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan juga retribusi menurun.
2. Menurut Rasio Efektivitas, Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung sebelum pandemic di tahun 2018 – 2019 masih tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan karena kinerja Pemerintah Kota Bandung yang kurang baik dalam hal menuai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pemungutan pajak dan retribusi daerah. Namun, di periode selanjutnya saat masa pandemic tahun 2020-2021 tergolong efektif dengan hasil rasio yang sama yaitu 91%.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung jika dianalisis dengan Rasio Efisiensi dari tahun 2018 – 2021 belum menunjukkan hasil yang efisien dikarenakan nilai rasio masih diatas 90%. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung masih dikategorikan kurang efisien baik sebelum pandemi maupun pasca pandemi.

#### Acknowledge

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Pada Masa Sebelum Pandemi dan Pasca Pandemi COVID-19” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sehubungan dengan telah selesainya karya tulis ilmiah ini maka perkenankan penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada keluarga, teman dan para dosen yang telah memberikan bantuan

bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Chodariyanti L. Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. *J Ekbis*. 2015;14(2):13.
- [2] Sriyana J. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul. *Unisia*. 2009;32(72):209–27.
- [3] Prawoto B, Jumiati A, Santoso E, Ilmu J, Pembangunan S, Ekonomi F, et al. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2001-2012 ( The Analysis of Regional Financial Performance of Probolinggo Regency in the 2001-2012 ). 2014;2012:1–8.
- [4] Mutiha A. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014. *J Vokasi Indones*. 2016;4(2).
- [5] Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi; 2010.
- [6] Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Berita [Internet]. 2021. Available from: <https://jabarprov.go.id/index.php/news/44942/2021/12/01/Yana-Ajak-Pengusaha-Pulihkan-Ekonomi-Kota-Bandung>
- [7] Pur Dwiastut MM. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019. *Prima Ekon*. 2021;Vol.12 No:23–35.
- [8] Badun M. Financial Intermediation By Banks and Economic Growth : a Review of Empirical Evidence. (1988).
- [9] Yusuf AM. Metode Penelitian : Kuantitatif,Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Edisi Pert. Jakarta: Kencana; 2014.
- [10] Abdul Halim. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat; 2007.
- [11] Mahmudi. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: UII Press; 2016.
- [12] Arisa, Jihan Anggraeni Ramdani. (2022). *Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan dan Keuangan Inklusif pada Pelaku UMKM Perempuan*. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 15-22.